

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan/atau Sumber Lainnya

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Kencana
- Chuenjit, P. (2014). The culture of taxation: Definition and conceptual approaches for tax administration. *Journal of Population and Social Studies [JPSS]*, 22(1), 14–34.
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37–48.
- MAHLIANA, M. (2019). *KOMUNIKASI POLITIK DALAM DEMOKRASI DIGITAL*. Universitas Siliwangi.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
- Nuraisah, N., Nurwanah, A., & Rosmawati, R. (2020). PENGARUH KESADARAN, PENYULUHAN, PELAYANAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara). *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 3(3).
- Putri, G. E., Setyawan, S., & Kom, M. I. (2018). *DIFUSI INOVASI PROGRAM PAJAK E-FILING (Studi Deskriptif Kualitatif dengan Pendekatan Teori Difusi Inovasi Program Pajak e-filing Kantor Radio Republik Indonesia di Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- PUTRI, I. D. A. Y. U. H. (2013). Difusi Inovasi Dalam Komunikasi Pemasaran Politik Indonesia. *Communication*, 4(2).
- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1(2), 1–17.
- Tarsono, T. (2010). Implikasi teori belajar sosial (social learning theory) dari albert bandura dalam bimbingan dan konseling. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3(1), 29–36.
- Yuliati, N. (2005). Televisi dan Fenomena Kekerasan Perspektif Teori Kultivasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6(1), 159–166.

2. Dokumen publik dan peraturan perundang-undangan

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008, tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013, tentang *Pedoman Penyuluhan Perpajakan*.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021, tentang *Edukasi Perpajakan*